Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

Viorela Dewi Presentia Ayu[1*], Mar'atus Solikah[2], dan Faisol[3]
[1,2,3]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
[1]viorelayu42@gmail.com , [2]solikahkediri@gmail.com, dan [3]faisol@unpkdr.ac.id

Received 19 Juni 2026 | *Revised* 11 Juli 2026 | *Published* 14 Juli 2026

**Corresponded Author*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi adanya gap fenomena, yaitu peningkatan intervensi pemerintah yang diwujudkan dalam pengeluaran publik, tidak diiringi dengan peningkatan secara signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, kinerja keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan manusia melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sampel penelitian terdiri atas 38 kabupaten/kota selama periode 3 tahun dengan total 114 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan STATA 14. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM), yang diolah dengan bantuan perangkat lunak versi STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 39,62% menunjukkan bahwa variasi IPM dapat dijelaskan oleh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD, sedangkan sisanya sebesar 60,38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Derajat Desentralisasi; Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

This research is motivated by the existence of a gap phenomenon, namely the increase in government intervention manifested in public spending, not recorded by a significant increase in the Human Development Index (HDI). Therefore, regional financial performance is one of the important factors that can influence the success of human development through the provision of quality public services. This study aims to analyze the effect of the Degree of Decentralization, the Regional Financial Independence Ratio, and the Effectiveness Ratio of Regional Original Revenue (PAD) on the Human Development Index (HDI) in districts/cities in East Java Province in 2022-2024. The study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), and the Budget Realization Report (LRA). The research sample consisted of 38 districts/cities over a 3-year period with a total of 114 observations. Data analysis was performed using panel data regression with STATA 14. The analytical method used is panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach, which was processed with the help of STATA software version. The results of the study indicate that the Degree of Decentralization has a significant negative effect on the Human Development Index (HDI), while the Regional Financial Independence Ratio and the PAD Effectiveness Ratio have a significant positive

effect on the HDI. Simultaneously, these three variables have a significant effect on the HDI. The coefficient of determination (R^2) value of 39.62% indicates that variations in the HDI can be explained by the Degree of Decentralization, the Regional Financial Independence Ratio, and the PAD Effectiveness Ratio, while the remaining 60.38% is influenced by other factors outside the research model. The results of this study indicate that regional financial performance has an important role in supporting the improvement of the quality of human development in East Java Province.

Keywords: *Regional Financial Performance; Fiscal Decentralization Degree; Regional Financial Independence; PAD Effectiveness; Human Development Index.*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam proses pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses kesehatan. Menurut Sari dan Riharjo (2020), kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai program pembangunan. Wulandari et al. (2024) menjelaskan bahwa kinerja pendapatan dan belanja daerah menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Sari dan Riharjo (2020), IPM juga menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan serta pertimbangan dalam alokasi dana pemerintah. Keberadaan IPM membantu pemerintah dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan. Selain itu, IPM mampu menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang besar terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat pembangunan manusia antar kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2023, terdapat sejumlah daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, terutama wilayah perkotaan seperti Surabaya, Malang, dan Madiun. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, dan Probolinggo masih memiliki nilai IPM yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

Selain terlihat dari perbedaan nilai IPM, ketimpangan pembangunan di Jawa Timur juga dapat diamati melalui pendapatan per kapita masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar antar kabupaten dan kota. Kota Kediri tercatat memiliki pendapatan per kapita tertinggi,

disusul Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sedangkan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan berada pada posisi terendah. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang masih terjadi antarwilayah. Daerah dengan pendapatan tinggi umumnya memiliki sektor industri dan perdagangan yang berkembang dengan baik. Sebaliknya, daerah dengan pendapatan rendah masih banyak bergantung pada sektor pertanian tradisional.

Fenomena ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat belum berlangsung secara merata. Meskipun IPM di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, laju peningkatan tersebut berbeda pada setiap daerah. Beberapa wilayah mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan, sementara wilayah lainnya masih mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta kebijakan belanja daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan manusia. Namun demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum tentu memberikan dampak yang sama pada setiap wilayah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pembangunan manusia. Ernawati (2024) menemukan bahwa kemandirian fiskal dan efektivitas keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Riharjo (2020) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap IPM. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutono et al. (2022) menunjukkan temuan yang berbeda terkait pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga indikator kinerja keuangan daerah, yaitu derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga variabel tersebut dipilih karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Pengeluaran Publik (*Public Expenditure Theory*) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan menggabungkan data cross-section dan time series. Unit analisis penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024. Penggunaan data terbaru diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi yang lebih aktual dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Selain menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, penelitian ini juga menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap IPM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan ekonomi pembangunan daerah. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Menurut Rahman et al. (2022), IPM digunakan untuk membandingkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan harapan hidup, tingkat pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Menurut Hidayat et al. (2023), IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Peningkatan ketiga aspek tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sejalan dengan Teori Pengeluaran Publik (*Public Expenditure Theory*) yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan perhitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3}(Indeks\ Kesehatan + Indeks\ Pendidikan + Indeks\ Pendapatan) \quad (1)$$

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hendri dan Yafiza (2020), rasio derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Konsep derajat desentralisasi sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Menurut Utari et al. (2023), tingkat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Persamaan derajat desentralisasi adalah sebagai berikut:

$$DD = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\% \quad (2)$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Rohmadani et al. (2024), rasio ini juga menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan Teori Pengeluaran Publik (*Public Expenditure Theory*) yang dikemukakan oleh Keynes (1936). mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Menurut Harahap (2024), rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan sumber pendapatan daerah sendiri.

Persamaan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$RKD = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\% \quad (3)$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Menurut Maharani et al. (2023), PAD diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Rasio efektivitas PAD menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Konsep efektivitas PAD sejalan dengan Teori Pengeluaran Publik yang dikemukakan oleh Wagner (1883).

Persamaan rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

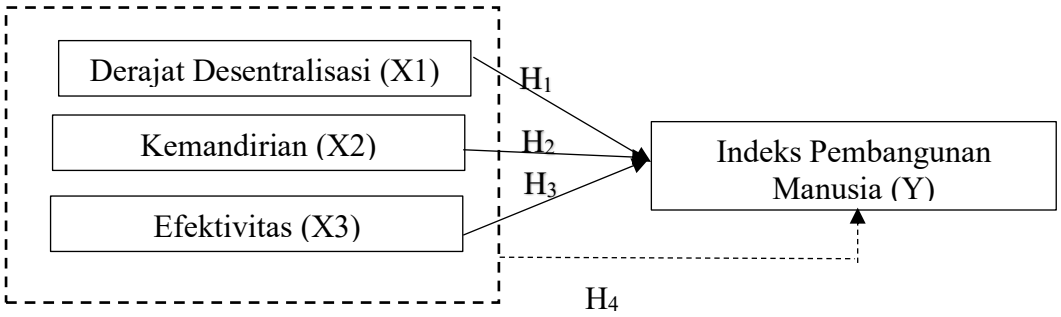
$$REPAD = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\% \quad (4)$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Riharjo (2020) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sendiri, maka semakin besar peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ernawati (2024) menemukan bahwa kemandirian fiskal dan efektivitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sutono et al. (2022) menunjukkan bahwa beberapa komponen belanja daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Berpikir

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur melalui derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Ketiga variabel tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki untuk membiayai pembangunan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi, rasio kemandirian, dan efektivitas PAD, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja keuangan daerah diduga memiliki pengaruh terhadap IPM baik secara parsial maupun simultan.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui peningkatan nilai IPM. Derajat desentralisasi diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_1 : Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi cenderung lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rasio kemandirian diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_2 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rasio efektivitas PAD menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin efektif pengelolaan PAD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Efektivitas PAD diduga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_3 : Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Derajat desentralisasi, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas PAD secara bersama-sama mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara optimal. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga variabel tersebut diduga berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_4 : Derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

METODE PENELITIAN

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian terdiri atas 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2022-2024 sehingga diperoleh 114 unit observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait melalui situs resmi BPS dan DJPK.

Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Derajat Desentralisasi (X_1), Kemandirian Keuangan Daerah (X_2), dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 KM_{it} + \beta_3 EPAD_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
α = Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
DD = Derajat Desentralisasi
KM = Kemandirian Keuangan Daerah
EPAD = Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
ε = Error term

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Derajat Desentralisasi (X_1)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).	PAD / Total Pendapatan Daerah × 100%
Kemandirian Keuangan Daerah (X_2)	Kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.	PAD / Pendapatan Transfer × 100%
Efektivitas PAD (X_3)	Kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan.	Realisasi PAD / Target PAD × 100%
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indikator yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Nilai IPM Kabupaten/Kota menurut BPS

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak STATA versi 14. Analisis data panel dipilih karena mampu menggabungkan data *cross section* dan *time series* sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai hubungan antara Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.

1. Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model data panel dilakukan untuk menentukan model regresi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pengujian dilakukan melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji *Chow* digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan

Random Effect Model (REM). Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Model yang terpilih kemudian digunakan dalam analisis regresi data panel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi statistik sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi antarvariabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual, serta uji autokorelasi untuk mengetahui adanya korelasi antara residual pada satu periode dengan periode lainnya.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD dalam menjelaskan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap IPM. Pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), di mana hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data Variabel Terikat (Indeks Pembangunan Manusia)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui umur harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Menurut Rahman et al. (2022), IPM dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat.

$$IPM = \frac{1}{3}(Indeks\ Kesehatan + Indeks\ Pendidikan + Indeks\ Pendapatan)$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki nilai rata-rata IPM tertinggi sebesar 90,60, sedangkan Kabupaten Sampang memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 23,36. Secara keseluruhan, rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian sebesar 33,58. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jawa Timur berada pada kategori yang cukup baik, meskipun masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Deskripsi Data Variabel Bebas

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilai rasio derajat desentralisasi, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Menurut Hendri dan Yafiza (2020), derajat desentralisasi dihitung menggunakan rumus:

$$Derajat\ Desentralisasi = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Kabupaten Bojonegoro memiliki rata-rata derajat desentralisasi tertinggi sebesar 115%, sedangkan Kota Surabaya memiliki rata-rata terendah sebesar 88%. Rata-rata derajat desentralisasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 99,64%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan tergolong sangat baik.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Menurut Rohmadani et al. (2024), rasio kemandirian dihitung dengan rumus:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Kota Surabaya memiliki nilai rata-rata rasio kemandirian tertinggi sebesar 350%, sedangkan Kabupaten Tulungagung memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 97%. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 146,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah mampu menjalankan pola hubungan delegatif dengan pemerintah pusat.

Efektivitas PAD

Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Maharani et al. (2023), rasio efektivitas PAD dihitung menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

Kabupaten Bojonegoro memiliki rata-rata efektivitas PAD tertinggi sebesar 115%, sedangkan Kota Surabaya memiliki nilai terendah sebesar 88%. Rata-rata efektivitas PAD kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode penelitian sebesar 100,56%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada umumnya mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan dengan kategori sangat efektif.

Hasil Analisis Data dan Interpretasi

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
IPM	114	33,58241	1,802375	29,26	38,09433
Derajat Desentralisasi	114	0,9964421	0,1242792	0,0010434	1,390342
Rasio Kemandirian	114	1,46031	0,4061147	0,0014685	3,513364
Efektivitas PAD	114	1,005585	0,0813151	0,5825224	1,390342

Sumber: Output STATA 14

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif baik dan tidak terdapat variasi data yang terlalu ekstrem selama periode penelitian.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai digunakan dalam penelitian, dilakukan Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Keterangan	Nilai
Prob > F	0,0000

Sumber: Output STATA 14

Nilai Prob > F sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan Common Effect Model.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Keterangan	Nilai
Prob > chibar²	0,0000

Sumber: Output STATA 14

Nilai probabilitas sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa Random Effect Model lebih baik dibandingkan Common Effect Model.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Keterangan	Nilai
Prob > Chi²	0,0002

Sumber: Output STATA 14

Berdasarkan hasil Uji Hausman, model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) karena memberikan estimasi yang paling sesuai untuk data penelitian.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel (Random Effect Model)

Variabel	Koefisien	Probabilitas
Konstanta	30,93031	-
Derajat Desentralisasi	-3,169576	0,000
Rasio Kemandirian	2,035299	0,000
Efektivitas PAD	2,822472	0,000

Sumber: Output STATA 14

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 30{,}93031 - 3{,}169576X_1 + 2{,}035299X_2 + 2{,}822472X_3 + e$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM, sedangkan derajat desentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap IPM.

Pembahasan

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hipotesis pertama diterima. Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -3,169576 menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila peningkatan kapasitas fiskal daerah belum diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori pengeluaran publik yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk pengeluaran yang kurang produktif atau proyek jangka panjang yang belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka peningkatan derajat desentralisasi tidak akan berdampak positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hendri dan Yafiza (2020) serta Utari et al. (2023) yang menemukan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hipotesis kedua diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan melalui PAD, maka semakin tinggi pula kualitas pembangunan manusia yang dihasilkan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan teori pengeluaran publik Keynes (1936), pemerintah yang memiliki kapasitas fiscal yang kuat akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohmadani et al. (2024) dan Harahap (2024) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia.

Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif pemerintah daerah dalam mencapai target PAD, maka semakin besar kemampuan fiskal yang dimiliki untuk membiayai berbagai program pembangunan. Tingginya realisasi PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut teori pengeluaran publik Wagner (1883), peningkatan pendapatan pemerintah akan mendorong peningkatan pengeluaran publik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani et al. (2023) dan F. N. Sari dan Riharjo (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, dan Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi, rasio kemandirian, dan efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Daerah yang mampu mengelola keuangan secara mandiri, mengoptimalkan penerimaan daerah, dan memanfaatkan sumber daya fiskal secara efektif akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 39,62% menunjukkan bahwa variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sebesar 60,38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, investasi daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian F. N. Sari dan Riharjo (2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur melalui derajat desentralisasi, rasio kemandirian, dan efektivitas PAD secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam memperoleh PAD belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan manusia apabila pengelolaan dan alokasi anggaran belum optimal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mandiri dan semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, maka semakin baik pula kualitas pembangunan manusia yang dihasilkan. Secara simultan, Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien determinasi sebesar 39,62% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi IPM, sedangkan sisanya sebesar 60,38% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Saran

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan kemandirian fiskal, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan IPM. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui keterlibatan dalam program pemerintah dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pengangguran serta memperluas periode dan objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim). "Pengeluaran per kapita riil disesuaikan".https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/2/MzQjMg%3D%3D/pengeluaran-per-kapita-riil-disesuaikan.html

Bai, J., Choi, S. H., & Liao, Y. (2020). *Standard Errors for Panel Data Models with Unknown Clusters*.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI (DJKP Kemenkeu). "Deskripsi dan analisis APBD".https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/deskripsi_dan_analisis_APBD_2011_a.pdf

Faisol, & Sujianto, A. E. (2020). Aplikasi Penelitian Keuangan dan Ekonomi Syariah Dengan Stata. Tulungagung: Cahaya Abadi.

Ghozali, (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, A. R. (2024). Analisa Kinerja Keuangan Kabupaten Sleman Pada Masa Covid-19. *Jesya*, *7*(2), 2089-2109. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1774

Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *4*(1), 56-66. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216

Hidayat, N., Nugrahadi, E. W., Rahman, H., & Daoni, F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *18*(2), 2023. https://doi.org/10.55981/jki.2023.1074

Maharani, R., Tadulako, U., Fadjar, A., Tadulako, U., Sastrawan, E., & Tadulako, U. (2023). *1353-Article Text-4698-1-10-20230504 (1)*. *1*(2).

Rahman, A., Harman, & Sudirman. (2022). Efek indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Effect of human development index on poverty and economic growth. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *19*(2), 268-276. https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.11174

Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., & Sari, Y. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, *13*(3), 674-681.

Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pemabanguann Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(e-ISSN: 2460-0585), 1-16.

Sari, R. A., & Aprianti, Y. (2024). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, *7*(1), 37-49. https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.172

Sugiyono, (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta

Sutono, I. A., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). *Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau*. *3*, 150-168.

Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektifitas (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021-2022). *Jurnal Eko-Bisma* |, *2*(2), 204-211.

Wulandari, C., Sofa, I. A., Ardiansyah, M., Aisyah, S. N., Sasongko, W. I., & Hapsari, M. T. (2024). Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2018-2023. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, *3*(4), 21-30. https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2670